



Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 88 Tahun 2022 tentang Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI)

Nia Karniawati¹, Ricky Nathanael Siahaan²

¹⁻²Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Komputer Indonesia

e-mail: nia.karniawati@email.unikom.ac.id, Nricky850@gmail.com

Article Info

Article history:

Received June 17, 2026

Revised July 12, 2026

Accepted July 16, 2026

Keywords:

Policy Implementation, BESTI Programme, Higher Education, Human Resources.

ABSTRACT

This study aims to analyse the implementation of Bandung Regency Regent Regulation No. 88 of 2022 on the Regent's Scholarship Programme (BESTI) in improving access to higher education and human resource development in Bandung Regency. The study employs a qualitative method with a descriptive approach through a literature review of relevant books, academic journals, and policy documents. The research analysis refers to George C. Edwards III's policy implementation model, which encompasses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of the BESTI Programme has proceeded reasonably well and has had a positive impact in assisting with student tuition costs and boosting motivation to pursue higher education. However, the programme's implementation still faces several challenges, such as suboptimal outreach, limitations in human resources and budget, low administrative discipline among some beneficiaries, and ineffective bureaucratic coordination. Therefore, optimisation of communication, strengthening of resources, and simplification of bureaucracy are required so that the implementation of the BESTI Programme can run more effectively, transparently, and in a targeted manner.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 17, 2026

Revised July 12, 2026

Accepted July 16, 2026

Keywords:

Implementasi Kebijakan, Program BESTI, Pendidikan Tinggi, Sumber Daya Manusia.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 88 Tahun 2022 tentang Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI) dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Bandung. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur terhadap buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Analisis penelitian mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program BESTI telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif dalam membantu pembiayaan pendidikan mahasiswa serta meningkatkan motivasi melanjutkan pendidikan tinggi. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurang optimalnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya kedisiplinan administratif sebagian penerima manfaat, serta koordinasi birokrasi yang belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi komunikasi, penguatan sumber daya, dan penyederhanaan birokrasi agar pelaksanaan Program BESTI dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nia Karniawati
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Komputer Indonesia
e-mail: nia.karniawati@email.unikom.ac.id

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab penting pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, dalam mengakses pendidikan tinggi, seperti keterbatasan biaya, kurangnya informasi, serta ketimpangan kesempatan. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 88 Tahun 2022 tentang Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI). Program ini dirancang sebagai bentuk intervensi kebijakan publik yang bertujuan untuk memberikan bantuan pembiayaan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung yang berprestasi namun memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, program BESTI juga diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi serta menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.

Meskipun secara normatif kebijakan ini memiliki tujuan yang strategis, dalam implementasinya seringkali ditemukan berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, proses seleksi yang belum optimal, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta potensi ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan yang baik, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Dalam perspektif ilmu pemerintahan dan administrasi publik, implementasi kebijakan menjadi tahap krusial yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menganalisis bagaimana implementasi Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI) dilaksanakan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Pemberian beasiswa merupakan salah satu bentuk konkret peran negara, khususnya Indonesia, dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks ini, beasiswa tidak hanya dipandang sebagai bantuan finansial semata, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang strategis untuk memperluas akses pendidikan, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. pentingnya peran tersebut, pemberian beasiswa perlu didukung oleh suatu sistem yang mampu menjamin ketepatan sasaran, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses penyalurannya. Sistem tersebut harus dirancang secara objektif dan terukur dengan mempertimbangkan berbagai variabel yang relevan, seperti tingkat penghasilan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, prestasi akademik maupun non-akademik, serta kondisi sosial ekonomi lainnya. Dengan demikian, proses seleksi penerima beasiswa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis pada analisis yang komprehensif terhadap kondisi calon penerima. Selain itu, penerapan sistem yang cepat dan akurat juga menjadi faktor penting



dalam meningkatkan efektivitas program beasiswa. Sistem yang terintegrasi dan berbasis data akan meminimalisir potensi kesalahan dalam penentuan penerima, mengurangi praktik ketidaktepatan sasaran, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Pada akhirnya, melalui mekanisme seleksi yang tepat, program beasiswa diharapkan benar-benar dapat menjangkau individu yang paling membutuhkan dan layak menerima, sehingga tujuan pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai secara optimal.

Penelitian terkait implementasi Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI) telah dilakukan oleh Widdy Yuspita Widiyaningrum dan Fachira Salsabila (2024) dalam jurnal *Moderat: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Penelitian tersebut bertujuan penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun program BESTI memberikan dampak positif bagi penerima, seperti membantu meringankan beban biaya pendidikan dan meningkatkan motivasi belajar, efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan pada aspek komunikasi, penambahan sumber daya, serta penyederhanaan birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI) telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan optimalisasi dalam beberapa aspek penting. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan fokus pada analisis implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 88 Tahun 2022 tentang Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI) secara lebih mendalam, guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta hambatan dalam pelaksanaannya.

Pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional memiliki peran penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk di bidang pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Bandung berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai program strategis, salah satunya adalah Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI). Pelaksanaan program ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 88 Tahun 2022 tentang Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI). Peraturan tersebut mengatur secara komprehensif berbagai aspek strategis, mulai dari tujuan program dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi, penetapan sasaran penerima yang berfokus pada masyarakat kurang mampu dan berprestasi, hingga ketentuan mengenai persyaratan administratif dan akademik yang harus dipenuhi oleh calon penerima beasiswa.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI) telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan optimalisasi dalam beberapa aspek penting. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan fokus pada analisis implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 88 Tahun 2022 tentang Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI) secara lebih mendalam, guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 88 Tahun 2022 tentang Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI) dalam pengembangan sumber daya manusia. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dijalankan serta dampaknya terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi di Kabupaten Bandung.

TINJAUAN TEORI



Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan, karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan adalah proses yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kebijakan (Edwards III, 1980). Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Implementasi kebijakan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti perbedaan kepentingan antar aktor, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berperan penting dalam memastikan bahwa informasi kebijakan dapat disampaikan secara jelas, konsisten, dan tepat kepada para pelaksana maupun kelompok sasaran, sehingga meminimalisir terjadinya distorsi informasi. Selanjutnya, sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, informasi, serta fasilitas pendukung yang memadai, yang menjadi faktor penentu dalam kelancaran pelaksanaan kebijakan. Selain itu, struktur birokrasi yang jelas, terorganisir, dan efisien turut menentukan efektivitas implementasi, karena berkaitan dengan mekanisme kerja, pembagian tugas, serta prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan.

Konsep Beasiswa dalam Kebijakan Publik

Beasiswa merupakan salah satu bentuk kebijakan publik di bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan bantuan pembiayaan kepada peserta didik atau mahasiswa. Dalam perspektif kebijakan publik, beasiswa tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program beasiswa biasanya ditujukan kepada individu yang memiliki keterbatasan ekonomi namun memiliki potensi atau prestasi yang baik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan mekanisme seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI)

Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, khususnya dari kalangan kurang mampu dan berprestasi. Program ini diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 88 Tahun 2022 tentang Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI). Dalam implementasinya, program BESTI tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan biaya pendidikan, tetapi juga berperan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas implementasi kebijakan, yang dapat dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III.

METODE



Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 88 Tahun 2022 tentang Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI). Fokus penelitian mengacu pada model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang meliputi empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang bertujuan untuk membangun pemahaman bersama serta mencapai keselarasan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam konteks pemerintahan, komunikasi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penghubung antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Melalui komunikasi yang efektif, informasi kebijakan dapat disampaikan secara jelas, konsisten, dan tepat sasaran, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam proses implementasi. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, khususnya implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 88 Tahun 2022 tentang Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI), komunikasi berfungsi sebagai sarana utama dalam menyampaikan informasi terkait tujuan kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Komunikasi yang baik akan memastikan bahwa pelaksana kebijakan memahami tugas dan tanggung jawabnya, sementara masyarakat sebagai penerima manfaat dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Selain itu, komunikasi juga berperan dalam proses koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Koordinasi yang efektif akan mendukung kelancaran implementasi serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program. Namun, apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan hambatan seperti ketidakjelasan informasi, keterlambatan pelaksanaan, serta ketidaktepatan sasaran kebijakan. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif, terbuka, dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Kebijakan yang konsisten memastikan bahwa kriteria seleksi, evaluasi, dan pemantauan penerima beasiswa tidak berubah-ubah, sehingga penerima dan pihak terkait dapat memenuhi harapan dan standar yang ditetapkan. Konsistensi ini juga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap program dan memfasilitasi proses evaluasi yang lebih baik, menjadikan program beasiswa ti Bupati (BESTI) lebih efektif dan tepat sasaran.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program beasiswa BESTI di Kabupaten Bandung. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Menurut (Hamali, 2023).



Selain itu, dari aspek sumber daya secara umum, implementasi program BESTI juga didukung oleh ketersediaan anggaran serta pemanfaatan teknologi informasi yang mempermudah proses pendaftaran, seleksi, hingga penyaluran bantuan. Keberadaan dukungan tersebut telah memberikan kontribusi nyata dalam membantu mahasiswa penerima manfaat, terutama dalam meringankan beban biaya pendidikan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang dimiliki. Keterbatasan ini berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program, terutama dalam hal pelayanan dan pengelolaan administrasi. Di sisi lain, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu hambatan dalam memperluas jangkauan penerima beasiswa, sehingga belum semua masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh manfaat dari program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan dan kualitas sumber daya menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Selain sumber daya manusia, aspek keuangan juga memegang peranan penting dalam menjamin keberlanjutan program beasiswa. Dalam implementasinya, dana program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung pada tahun 2022 sebesar 2 miliar rupiah digunakan untuk mendukung pembiayaan pendidikan bagi 50 mahasiswa, dan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan alokasi anggaran ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan program beasiswa secara berkelanjutan. Namun demikian, pengelolaan keuangan yang efektif tetap diperlukan agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

Aspek aksesibilitas dan transparansi informasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Penyampaian informasi yang terbuka dan mudah diakses akan memastikan bahwa program beasiswa dapat dijangkau oleh seluruh calon penerima yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian, kombinasi antara ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan anggaran yang memadai, serta transparansi informasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas implementasi program beasiswa BESTI.

3. Disposisi

Menurut (Ayu, 2023) Disposisi merupakan kecenderungan individu untuk bertindak atau merespons suatu situasi tertentu, yang dalam konteks kebijakan publik merujuk pada sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Disposisi yang baik akan mendorong pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugas secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 88 Tahun 2022 tentang Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI), disposisi tidak hanya terlihat dari sikap pelaksana, tetapi juga dari perilaku penerima manfaat dalam memenuhi ketentuan program.

Dalam hal program BESTI, disposisi tercermin melalui tingkat kedisiplinan dan ketertiban, baik dari pelaksana maupun penerima beasiswa. Pelaksana kebijakan pada umumnya menunjukkan sikap yang mendukung terhadap pelaksanaan program, yang ditunjukkan melalui komitmen dalam menjalankan tugas serta upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini berkontribusi terhadap terciptanya proses pelaksanaan program yang relatif tertib dan terarah. Di sisi lain, program ini juga memperoleh respons positif dari penerima manfaat karena dinilai mampu membantu keberlanjutan pendidikan mereka, khususnya dalam meringankan beban biaya pendidikan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan disposisi penerima



manfaat. Meskipun proses seleksi mahasiswa telah berjalan dengan tertib, masih ditemukan adanya sebagian penerima yang kurang kooperatif, terutama dalam hal pemenuhan persyaratan administratif seperti keterlambatan dalam pengumpulan dokumen, termasuk transkrip akademik. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam aspek tanggung jawab administratif dari sebagian penerima beasiswa, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program secara keseluruhan.

Selain itu, dari sisi pengelolaan sistem, dukungan teknologi informasi turut memperkuat aspek disposisi dalam implementasi kebijakan. Hal ini tercermin dari pengembangan aplikasi BESTI yang dirancang untuk mempermudah akses layanan beasiswa serta meningkatkan efisiensi proses administrasi. Melalui fitur-fitur yang tersedia, sistem ini memungkinkan adanya monitoring yang lebih ketat terhadap proses pelaksanaan program, sehingga dapat mendorong peningkatan kedisiplinan baik dari pelaksana maupun penerima manfaat. Dengan demikian, disposisi yang baik, didukung oleh sistem yang terintegrasi, menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah sistem otoritas yang diatur secara rasional melalui berbagai aturan untuk mengorganisir pekerjaan banyak orang (Sawir, 2019). Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program BESTI pada dasarnya telah tersusun dengan cukup jelas, terutama dalam hal pembagian tugas, alur koordinasi, serta prosedur operasional yang mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 88 Tahun 2022 tentang Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI). Dalam konteks pemerintahan, birokrasi memiliki fungsi utama sebagai instrumen pelaksana kebijakan melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan terstruktur. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, seperti perangkat daerah terkait, termasuk Diskominfo, akademisi, serta mahasiswa sebagai penerima manfaat, yang masing-masing memiliki peran dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Pada praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menunjukkan bahwa struktur birokrasi belum berjalan secara optimal. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait, yang berdampak pada keterlambatan penyampaian informasi serta proses penyaluran bantuan. Selain itu, belum adanya tim khusus yang secara fokus menangani program BESTI menjadi faktor yang memperlambat pelaksanaan program, baik dalam aspek administrasi maupun teknis. Kondisi ini juga diperkuat oleh pandangan dari pihak pelaksana dan penerima manfaat yang menyatakan bahwa birokrasi program masih kurang efektif, terutama dalam hal ketepatan waktu pencairan anggaran dan distribusi informasi. prosedur birokrasi yang relatif panjang turut menjadi hambatan dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan program. Keterlambatan informasi dan pencairan dana yang dirasakan oleh mahasiswa penerima beasiswa menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi telah tersedia, implementasinya belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan praktik di lapangan.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan program beasiswa, birokrasi yang ideal seharusnya mampu menjamin proses administrasi yang sederhana, transparan, dan efisien, serta memberikan kemudahan akses bagi seluruh calon penerima yang memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penyederhanaan prosedur birokrasi, pembentukan tim khusus yang fokus menangani program, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, T. H. (2023). Dimensi Disposisi Atau Sikap Pelaksana Dalam Implementasi Ke-Bijakan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Media Bina Ilmiah*, 867-874
- CNN Indonesia. (2024, February 16). Program Besti Pemkab Bandung Segera Dibuka, Siapkan 130 Kuota. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240216205638-305-1063799/program-besti-pemkab-bandung-segera-dibuka-siapkan-130-kuota#>
- Hamali, A.Y. (2023). *Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Caps Publishing.
- Sawir, M. (2019). Tinjauan Mengenai Fungsi Birokrasi Pemerintahan Di Indonesia. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*. 208-221
- Widiyaningrum, W. Y., & Salsabila, F. (2024). Implementasi Program Beasiswa Ti Bupati (Besti) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(4), 772-787.